

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM KERJA
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM TATANAN
NORMAL BARU DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**DIAH AYU PURNAMASARI
07011281722067**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM KERJA APARATUR
SIPIL NEGARA DALAM TATANAN NORMAL BARU DI
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN
SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

DIAH AYU PURNAMASARI
NIM. 07011281722067

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Oktober 2021

Pembimbing I

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
Nip. 196511171990031004



Pembimbing II

Ermanovida, S.Sos., M.Si
Nip. 196911191998032001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

IMPLEMENTASI SISTEM KERJA APARATUR SIPIL
NEGARA DALAM TATANAN NORMAL BARU DI
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 18 November 2021
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.

Ketua

Ermanoyida, S.Sos., M.Si.

Anggota

Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM.

Anggota

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

Anggota

Analisa

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Inderalaya, November 2021
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sistem Kerja Merupakan Kebijakan, Taat Protokol Kesehatan Adalah
Kewajiban”

**Atas Rahmat Allah SWT, Skripsi ini saya
persembahkan untuk :**

- 1. Kedua orangtuaku, Bapak Cahyadi dan Ibu Nasikatin**
- 2. Mas dan Mbak ku, Mas Kuat, Mas Langgeng, Mas Ali dan Mbak Renggo**
- 3. Dosen dan Pegawai FISIP Unsri**
- 4. Teman-teman seperjuangan Ilmu Adm Publik 2017**
- 5. Almamaterku, Universitas Sriwijaya**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kebijakan sistem kerja normal baru dengan penerapan protokol kesehatan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang menyatakan untuk melihat suatu implementasi kebijakan terdapat empat faktor yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak mematuhi surat edaran. Hal ini dipengaruhi oleh sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Untuk implementasi kebijakan sistem kerja aparatur sipil negara dalam tata normal baru di badan pendapatan daerah provinsi Sumatera Selatan yang efektif, disarankan untuk menegakkan disiplin yang tinggi, melakukan pengecekan protokol kesehatan secara tegas dan penegakan sanksi yang kuat.

Kata kunci: COVID-19, Implementasi, Adaptasi Normal Baru, Protokol Kesehatan, Provinsi Sumatera Selatan.

Pembimbing I


Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
Nip. 196511171990031004

Pembimbing II


Ermanovida, S.Sos., M.Si
Nip. 196911191998032001

Indralaya, November 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

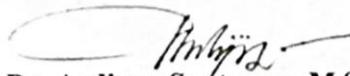

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 1981082720091210

ABSTRACT

This is a research with the title of "Implementation of the Work System Policy of State Civil Apparatus in New Normal Order in the Regional Revenue Agency of South Sumatra Province". This study aimed to determine the implementation of the new normal work system policy with the application of health protocols in the Regional Revenue Agency of South Sumatra Province. This study used a qualitative descriptive method using the George Edward III's theory of policy implementation which stated that in order to take a look at a policy implementation, there are four factors that are need to keep in mind, such as Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The result of this study indicated that the Regional Revenue Agency of South Sumatra Province did not comply with the circular. This was influenced by resources, disposition and bureaucratic structure. For an effective implementation of work system policy of the state civil apparatus in the new normal order in the regional revenue agency of South Sumatra province, the enforce of high discipline, strict check on health protocols and enforce strong sanctions are highly recommend.

Keywords: *COVID-19, Implementation, New Normal Adaptation, Health Protocol, South Sumatra Province.*

Advisor 1


Dr. Ardivan Saptawan, M.Si
Nip. 196511171990031004

Advisor II


Ermanovida, S.Sos., M.Si
Nip. 196911191998032001

Indralaya, November 2021
Chairman of the Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University


Zailani Surva Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 1981082720091210

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua ku Bapak Cahyadi dan Ibu Nasikatin yang telah memberikan dukungan penuh dari segala aspek. Mas Kuat, Mas Langgeng, Mas Ali, Mbak Renggo yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam segala hal.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E. selaku rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr Kiagus M. Sobri selaku dekan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung S.Sos., MPA., selaku Ketua Jurusan dan dosen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Hj. Nurmah Semil, M.Si. selaku Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan M.Si selaku pembimbing pertama yang telah memberikan arahan dan waktu dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga akhir.
7. Ibu Ermanovida S.Sos., M.Si selaku pembimbing kedua yang telah memberikan arahan dan waktu dalam proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga akhir.
8. Ibu Dra. Hj. Neng Muhaiba, M.M selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Ibu Khodijah, S.Sos selaku Staf Pelaksana Sub Bidang Umum dan Kepegawaian yang telah membimbing di tempat penelitian.
10. Sahabat seperjuanganku Fadhillah, Kevin, Rena, Febby, Lis, Pipit, Fatta, Suci, Widya, Via, Nisa.
11. Sahabat Jambi, Vali, Mia, Dea, Aufa, Fifi, Epan, Joshua, Pintor, Novrialdi.
12. UKM Unsri Mengajar beserta sobat sekretku Kak Lita, Kak Zain, Kak Rima, Dedek, Ajeng, Ayu, Epa, Cheetah, Ami, Rudi, Farah, Uceng, kak dilan, Mila, Rezaldi, Jerry.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dan berkaitan dengan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun.

Indralaya, November 2021

Diah Ayu Purnamasari

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Manfaat Penulisan	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Kebijakan Publik	8
2.1.2 Pengelompokan Kebijakan Publik.....	9
2.1.3 Implementasi Kebijakan	11
2.2 Penelitian Terdahulu	16
2.3 Kerangka Pemikiran	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Aspek Penelitian.....	20
3.3 Fokus Penelitian	22
3.4 Jenis dan Sumber Data	23
3.5 Teknik Penentuan Informan Penelitian	23

3.6 Teknik Pengumpulan Data	24
3.7 Teknik Analisis Data.....	24
3.8 Sistematika Penulisan	26
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
4.1.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	27
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	29
4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	30
4.1.4 Sumber Daya Manusia di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	40
4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Tatanan Normal Baru di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	41
4.2.1 Komunikasi dalam Pelaksanaan Kebijakan Sistem Kerja ASN pada masa Normal Baru di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	41
4.2.2 Sumber Daya dalam Pelaksanaan Kebijakan Sistem Kerja ASN pada masa Normal Baru di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	46
4.2.3 Disposisi Pelaksanaan Kebijakan Terhadap Implementasi Kebijakan Tatanan Normal Baru	51
4.2.4 Pengaruh Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Sistem Kerja ASN pada Masa Normal Baru	53
BAB V KESIMPULAN.....	56
1. Kesimpulan	56
2. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jumlah Konfirmasi Positif dan Konfirmasi Baru di Provinsi Sumatera Selatan	2
Gambar 2 Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn	12
Gambar 3 Model Implementasi Edward III	15
Gambar 4 Kerangka Pemikiran	19
Gambar 5 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	40
Gambar 6 Poster Himbauan Protokol Kesehatan di Pintu Masuk BAPENDA	45
Gambar 7 Wastafel dan Sabun Cuci Tangan, <i>Thermogun</i> , <i>Handanitizer</i> , dan Bilik Disinfeksi	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu yang Berkaitan dengan Penelitian	16
Tabel 2 Variabel Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	22
Tabel 3 Jumlah UPTB yang dibawah oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	28
Tabel 4 Jumlah ASN di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan....	41
Tabel 5 Komponen-komponen Fasilitas Protokol Kesehatan	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Lembar Konsultasi Proposal
3. Lembar Revisi Proposal
4. Lembar Konsultasi Skripsi
5. Lembar Revisi Ujian Komprehensif
6. Surat Izin Penelitian
7. Surat Balasan Izin Penelitian
8. Dokumentasi Penelitian
9. Surat Edaran Gubernur nomor: 800/149/BKD.I/2020

BAB I

PENDAHULUAN

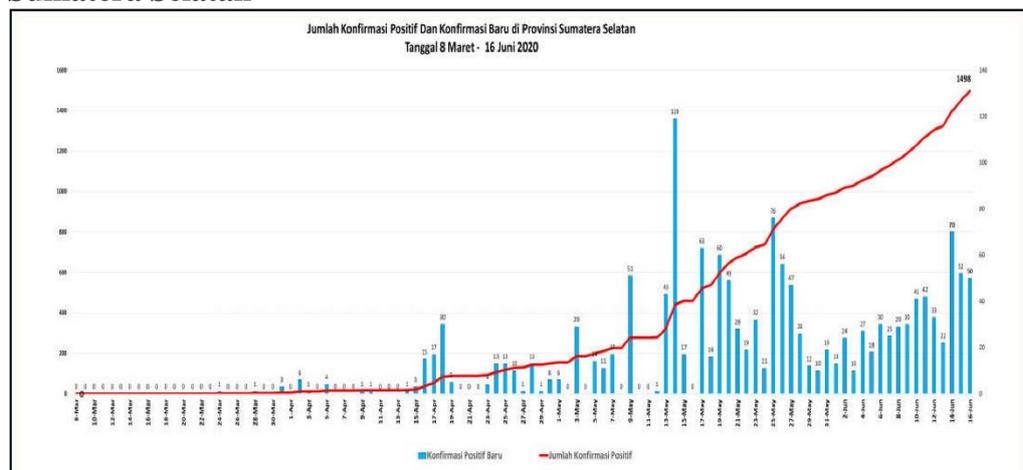
1.1 Latar Belakang

Kebijakan publik merupakan sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berkaitan. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau orang yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Menurut James Anderson (dalam Leo Agustino 2008:7) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Dunia sedang digemparkan oleh *Coronavirus Disease (Covid-19)* sehingga berdampak ke semua kegiatan yang mengharuskan semua orang untuk tetap di rumah saja, akan tetapi disisi lain kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik harus tetap berjalan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN RB) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru (*New Normal*). Surat Edaran tersebut disahkan dan ditandatangani pada 29 Mei 2020 oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo yang menandakan bahwasanya sistem kerja pada masa tatanan normal baru beradaptasi secara fleksibel.

Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan mengumumkan bahwa kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020, dan pada bulan selanjutnya menyebar ke-34 Provinsi di Indonesia tak terkecuali Provinsi Sumatera Selatan. Kasus Covid-19 di Sumatera Selatan semakin meningkat setiap harinya dan termasuk dalam kasus konfirmasi Covid-19 tertinggi di Indonesia. Berikut merupakan data peningkatan Covid-19 terhitung dari 8 Maret 2020 sampai dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Nomor : 800/149/BKD.I/2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan :

Gambar 1 Jumlah konfirmasi positif dan konfirmasi baru di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: Website Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Menurut data yang diperoleh dari *website* Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (www.menpan.go.id):

“Sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) turut beradaptasi sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang tatanan normal baru bagi ASN. Penyesuaian sistem kerja diperlukan untuk adaptasi selama pandemi masih terjadi. Selama tatanan normal baru, ASN bekerja secara fleksibel, yakni pelaksanaan tugas di kantor (*work from office*) dan bekerja dari rumah (*work from home*).

Tugas dan fungsi ASN dalam tatanan normal baru dilakukan dengan tetap memprioritaskan aspek kesehatan dan keselamatan bagi ASN dengan cara

menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas keseharian. Berdasarkan *website* resmi humas sekretariat kabinet Republik Indonesia (www.setkab.go.id) bahwasanya adaptasi terhadap tatanan normal baru di lingkungan, lembaga atau daerah meliputi:

1. Penyesuaian sistem kerja
Penyesuaian sistem kerja dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja, yakni pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan atau pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*)
2. Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen SDM aparatur antara lain penilaian kinerja oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK); pemantauan dan pengawasan oleh pimpinan unit kerja; dan PPK memastikan kedisiplinan pegawai;
3. Dukungan Infrastruktur
Menyesuaikan dengan tatanan normal baru, PPK diminta untuk mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan fleksibilitas lokasi bekerja dan memastikan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan dengan memperhatikan pedoman penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan keamanan informasi dan keamanan siber.

Menimbang bahwa saat ini keadaan sudah dapat dikembalikan dan dikutip dari pernyataan Presiden Republik Indonesia Ir. H Joko Widodo bahwa kita harus segera berdamai dengan keadaan ini yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi yang kemudian di Sumatera Selatan dilanjutkan dengan turunnya pada Surat Edaran Gubernur Nomor: 800/149/BKD.I/2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Salah satu dinas daerah yang ada di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan adalah Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) merupakan dinas daerah yang khususnya mengemban tugas untuk mengelola sumber pendapatan daerah dalam upaya pemerintah daerah untuk menghimpun dana dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan daerah. Sehubungan dengan itu untuk menunjang usaha-usaha pembangunan di daerah, Provinsi Sumatera Selatan perlu mengadakan upaya-upaya untuk mengembangkan dan mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan secara lebih intensif guna mencapai target pendapatan daerah yang ditetapkan.

Pandemi Covid-19 berdampak pada perilaku atau sistem kerja ASN yang ada di BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan menjadi berbeda. Sistem kerja yang tadinya bisa dilakukan secara tatap muka kini berganti menjadi daring (*online*), apel pagi yang tadinya ada kini ditiadakan, senam sehat yang dilakukan rutin setiap hari Jumat pun ditiadakan. Berubahnya sistem kerja di BAPENDA tidak luput dari pemberlakuan *Work From Home* (WFH). WFH dilakukan ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlaku. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/328/2020 terdapat hal-hal yang harus dipatuhi saat kembali bekerja pasca pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di poin b yaitu “Mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah”.

Sistem kerja ASN dalam masa normal baru kemudian diatur pula sesuai Surat Edaran Gubernur Nomor: 800/149/BKD.I/2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan yang dikeluarkan pada bulan Juni. Dikeluarkannya kebijakan baru ditengah pandemi ini tentunya belum berjalan dengan baik dan optimal karena harus adanya adaptasi yang diperlukan. Adaptasi seperti pegawai yang harus menggunakan masker, harus melewati bilik disinfeksi, dan harus melakukan pengecekan suhu tubuh wajib dilakukan oleh seluruh pegawai di instansi pemerintahan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, salah termasuk badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Surat Edaran Gubernur Nomor: 800/149/BKD.I/2020 poin kedua tentang maksud dan tujuan yang tertera pada huruf d yaitu bahwa tujuan dari surat edaran ini adalah untuk melindungi Kesehatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari risiko penularan *Coronavirus Disease (Covid-19)*, BAPENDA Provinsi Sumsel harus beradaptasi dan melakukan protokol kesehatan dengan benar. Hal-hal dasar yang menunjang untuk mencapai hal tersebut seperti memakai masker dan pengecekan suhu pun masih banyak yang enggan melakukannya. Ditinjau dari penyelenggaraan kegiatan selain pelayanan publik (Surat Edaran Gubernur Nomor : 800/149/BKD.I/2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan) disebutkan bahwa:

- a) Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, workshop, konsinyasi, pemantauan, evaluasi dan kegiatan sejenis lainnya yang menyebabkan kerumunan banyak orang dialihkan menjadi kegiatan pertemuan melalui media telekonferensi
- b) Penyelenggaraan kegiatan perjalanan dinas dalam negeri agar disesuaikan dengan tingkat urgensi permasalahan dan dibuktikan dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang dengan waktu paling lama 5 (lima) hari dan melampirkan hasil negatif *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* berdasarkan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Test* atau *Rapid Test*
- c) Kegiatan rapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilaksanakan dengan telekonferensi dan kolaborasi secara daring.

Berdasarkan data yang menunjukkan Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan semakin meningkat maka dikeluarkan Surat Edaran Gubernur Nomor: 800/149/BKD.I/2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar ASN tetap produktif dan tidak terpapar Covid-19 serta bekerja dengan mematuhi protokol Kesehatan. Setelah dikeluarkannya surat edaran ini, masih terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan belum beradaptasi secara maksimal. Dikutip dari mediasumatera.id yang terbit pada tanggal 14 Oktober 2020 bahwa BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan masih melakukan sosialisasi pemutihan di pusat keramaian.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa BAPENDA Provinsi Sumatera Selatan belum sepenuhnya menerapkan kebijakan sistem kerja ASN dalam tatanan normal baru, karena itu perlu untuk dilakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditinjau dari faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dengan harapan penelitian ini dapat menjadi studi bersama dan juga sebagai evaluasi bagi instansi terkait agar implementasi dari kebijakan ini dapat menjadi lebih baik kedepannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat di latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sistem kerja aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sistem kerja aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini kedepannya dapat bermanfaat bagi akademisi administrasi publik untuk referensi dalam penelitian maupun pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan sistem kerja aparatur sipil negara dimasa normal baru.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjelaskan dan menggambarkan mengenai sistem kerja ASN pada masa normal baru dan dimasa yang akan datang, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait, sebagai referensi untuk permasalahan terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: PUSTAKA SETIA.
- Aziz, Muhammad Imam Abdul (2019). *Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat Di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang*. Universitas Sriwijaya.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10, 55–58.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. (2020, Juni 17). *Update Situasi Covid-19 Sumsel 16 Juni 2020*. Retrieved from Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan: <http://dinkes.sumselprov.go.id/2020/06/update-situasi-covid-19-sumsel-16-juni-2020/>
- Dunn, William N. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- HUMAS. (2020, Mei 29). *Menteri PANRB Terbitkan SE Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru*. Retrieved from setkab.go.id: <https://setkab.go.id/menteri-panrb-terbitkan-se-nomor-58-tahun-2020-tentang-sistem-kerja-pegawai-asn-dalam-tatanan-normal-baru/>
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Moleong, Lexy. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Nugroho, Riant. (2018). *Public Policy, Dinamika Kebijakan-analisis kebijakan-manajemen kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Panjaitan, V. E. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NEW NORMAL APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN LIPI BANDUNG. *Jurnal Enersia Publika Vol.4, No.2*, 269-291.
- Subarsono. (2006). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Surat Edaran (SE) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru (New Normal)

Surat Edaran Gubernur Nomor : 800/149/BKD.I/2020 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Analisis Kebijakan* . Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. (2011). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis proses Kebijakan Publik* . Malang: Bayu Media.

Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service.

Yuadira, Sheli. (2020). *Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang*. Universitas Sriwijaya.

Yunita Laponte, M. T. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA PADA. *Jurnal Kolaboratif Sains Vol.1 No.1*, 1-17.

Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* . Jakarta: Kencana.